

# Korupsi adalah Kita?

7 Februari 2019,

Oleh:  
Benydictus S

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Festival Anti Korupsi Bandung 2015 Prung! GAK PAKE KORUPSI! pgn

LAPANGAN TEGALEGA, BANDUNG  
JUMAT, 11 DESEMBER 2015

**THE UNCORRUPTED**

MEMBANGUN  
GENERASI SERUM  
ANTI-KORUPSI

**SLANK** **EFEK RUMAH KACA**  
**KARINDING ATTACK** **JERUJI**  
**EYEFEEELSIX**

**MICRO GIGS** 26 NOV  
3,6 DES

**ART EVENT**  
1-4 DESEMBER  
KEN TERROR  
SHAKE I MORGG

BANDA NEIRA  
FLUKEMINIMIX  
TARING · ALONE AT LAST  
JAGAL SANGKAKALA  
SUNDANIS HIPHOP

**WORKSHOP  
MUSIK**  
GEBEG | DJ-E VIL CUTS  
AGUNG GUITAR COURSE  
KELAS KARINDING

CEK JADWAL LENGKAP EVENT DI  
WWW.UNCORRUPTEDFEST.COM

CATCH US ON: @unc\_fest @unc\_fest uncorrupted festival uncorrupted festival

**Korupsi...**



# Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi **tujuh jenis** besar.



**1** **KERUGIAN KEUANGAN**

**NEGARA**

Ps. 2 , Ps. 3  
(penyalahgunaan wewenang)



**2**

**SUAP-MENYUAP**

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps. 5(2); Ps 12 a,b;  
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d



**6**

**KONFLIK**  
**KEPENTINGAN**  
**DALAM**  
**PENGADAAN**

Pasal 12 huruf i



**3**

**PENGGELAPAN**  
**DALAM JABATAN**

Pasal 8; 9; 10 a,b,c



**7**

**GRATIFIKASI**

Pasal 12B jo Pasal 12C



**5**

**PERBUATAN**  
**CURANG**

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h



**4**

**PEMERASAN**

Pasal 12 huruf e,f,g



**TINDAK**  
**PIDANA LAIN**  
**YANG BERKAITAN**  
**DENGAN KORUPSI**

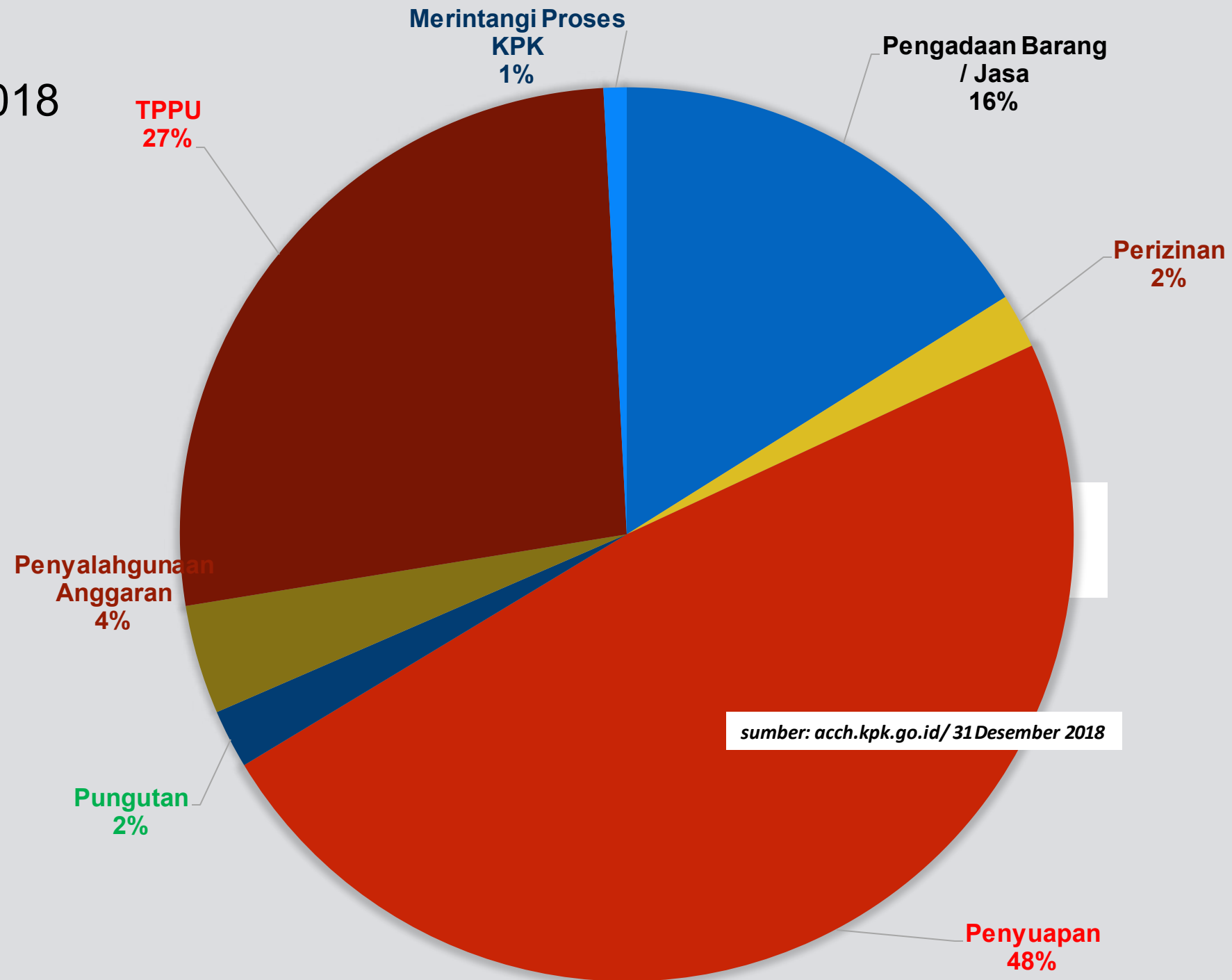
- 1.Merintang proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

# United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006



# Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Jenis Perkara  
Tahun 2004 – Desember 2018

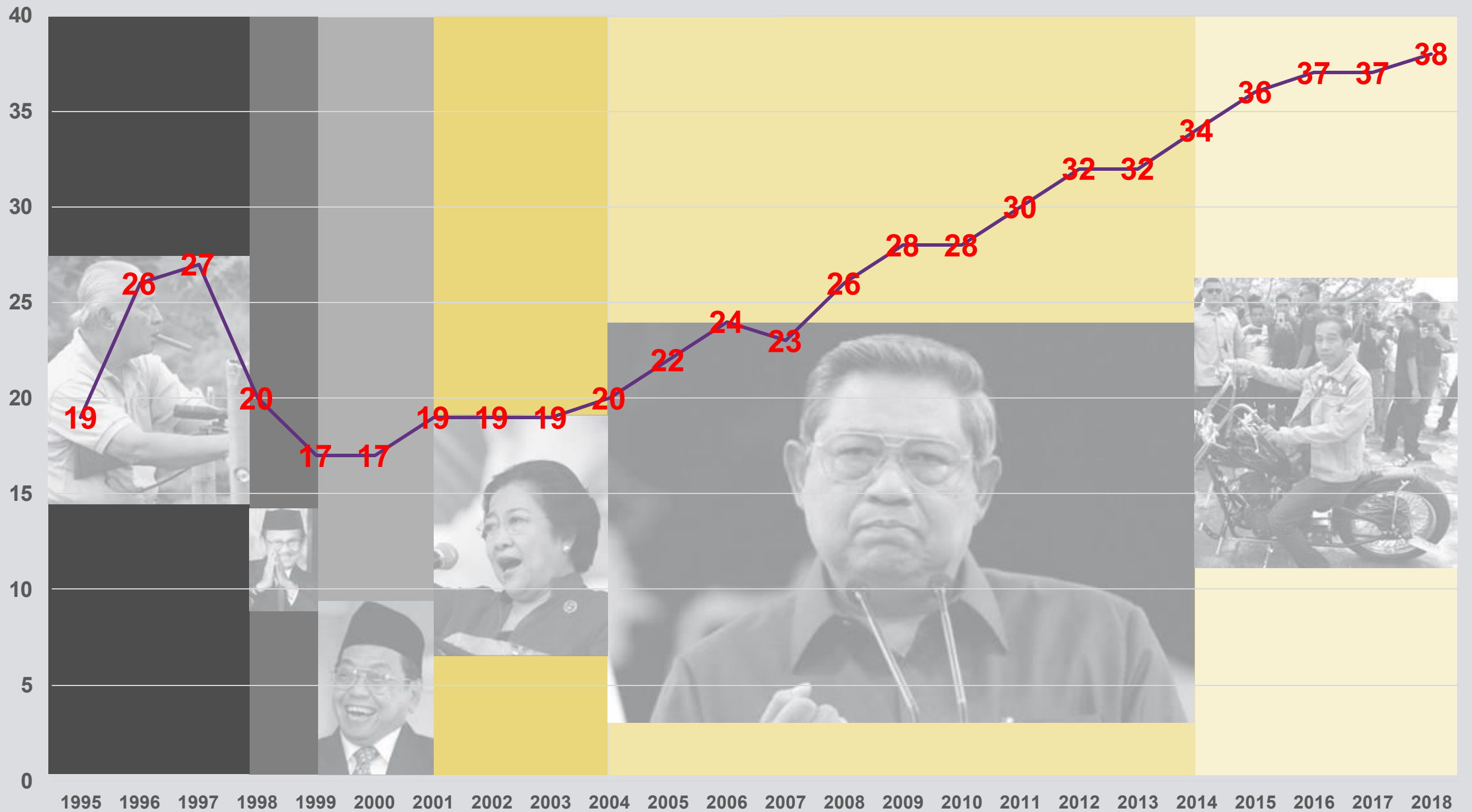


**Modus**  
TPPU & Suap  
menjadi mayoritas

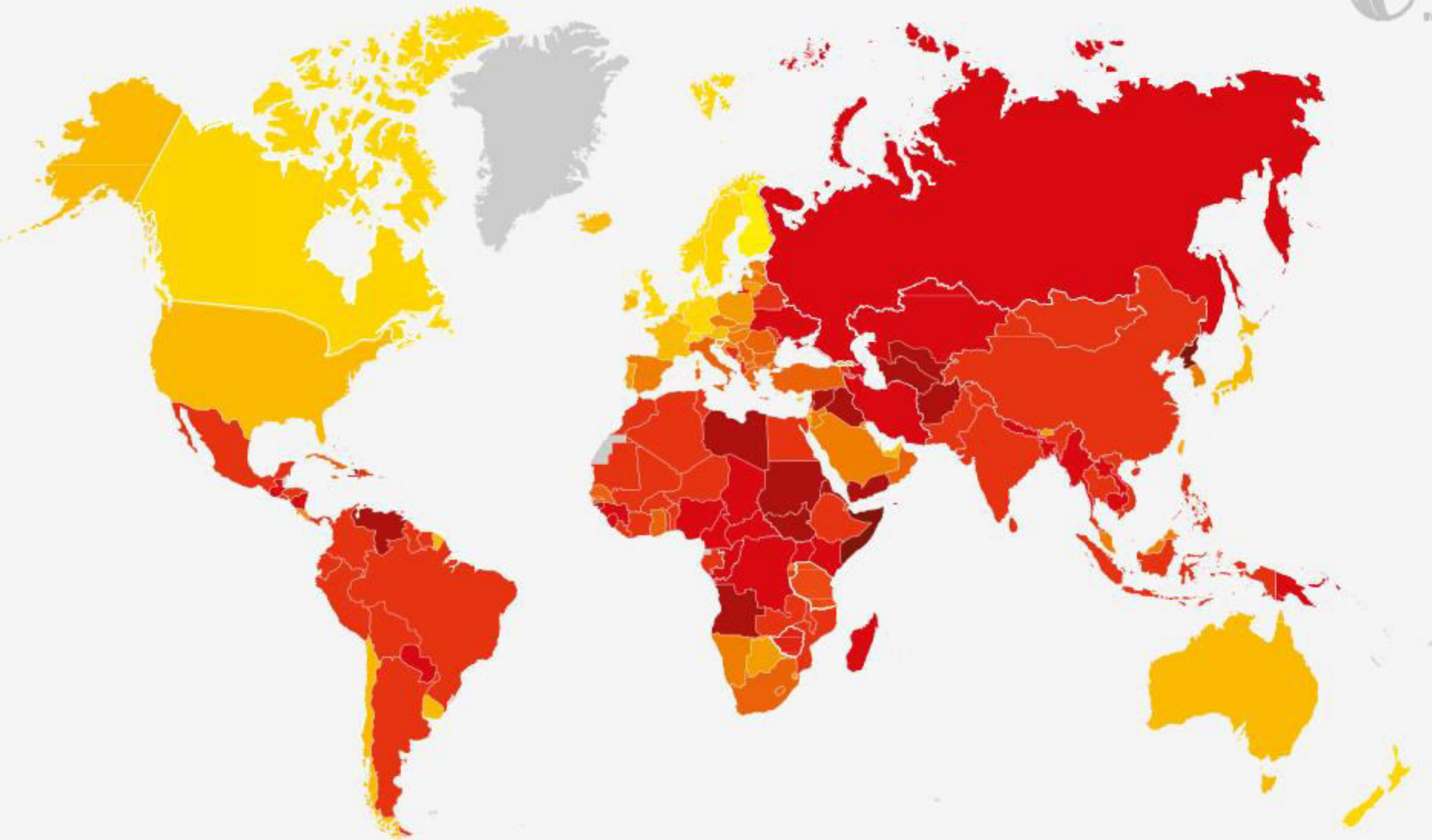
**75%**

# Skor CPI Indonesia (1995-2018)

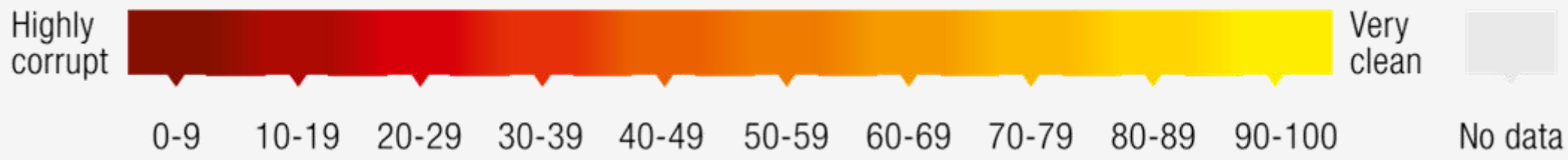
Sumber: *Transparency International Indonesia*







# SCORE



# Negara dengan Peringkat IPK terbaik

**88**



**87**



**85**



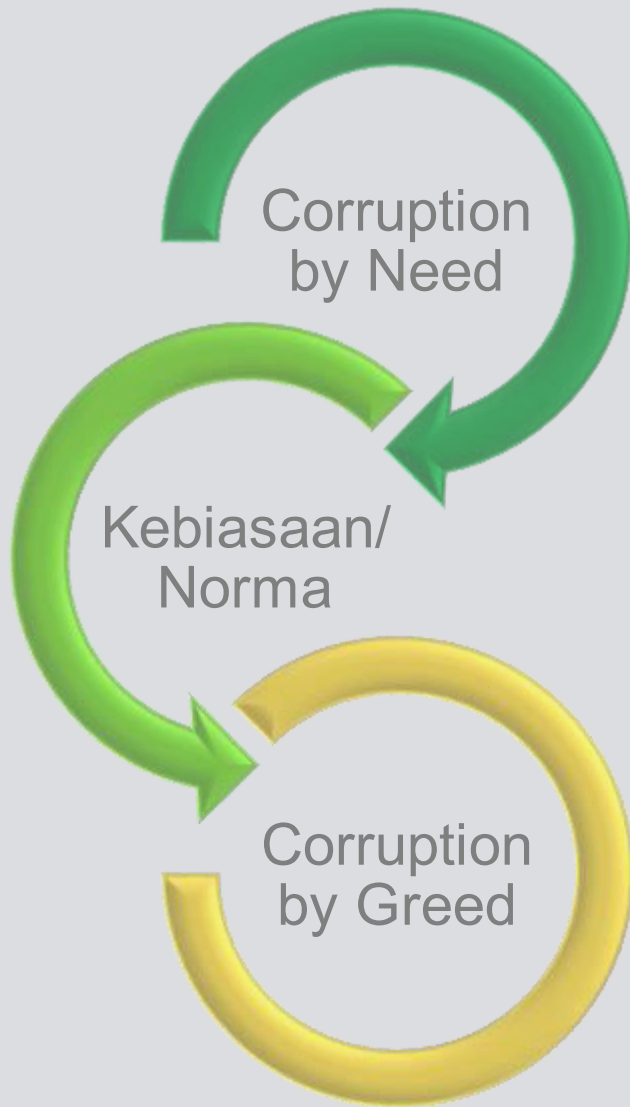
**38**





# Mengapa Fraud/Korupsi Terjadi?

(Rimawan Pradiptyo, 2017)





## Dampak KORUPSI?

- Dampak Korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources*, sehingga perekonomian tidak optimum.
- Korupsi menimbulkan biaya sosial
- Biaya social: eksplisit & implisit

# Strategi



PARAN (Panitia *Retooling*  
Aparatur Negara) **1957**

Opstib (Operasi Tertib) **1977**

**GLOBAL CRISIS 1998**

Pengadilan Tipikor dibentuk **2004**

**1967** TPK (Tim Pemberantasan  
Korupsi)

**1987** Tim Operasi Khusus Pajak

**2003** Komisi Pemberantasan  
Korupsi terbentuk

**2018** Stranas PK

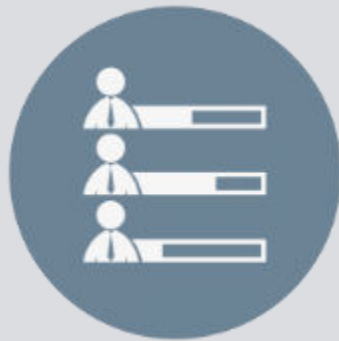


# Kewenangan Penindakan KPK

(Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002)



Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;



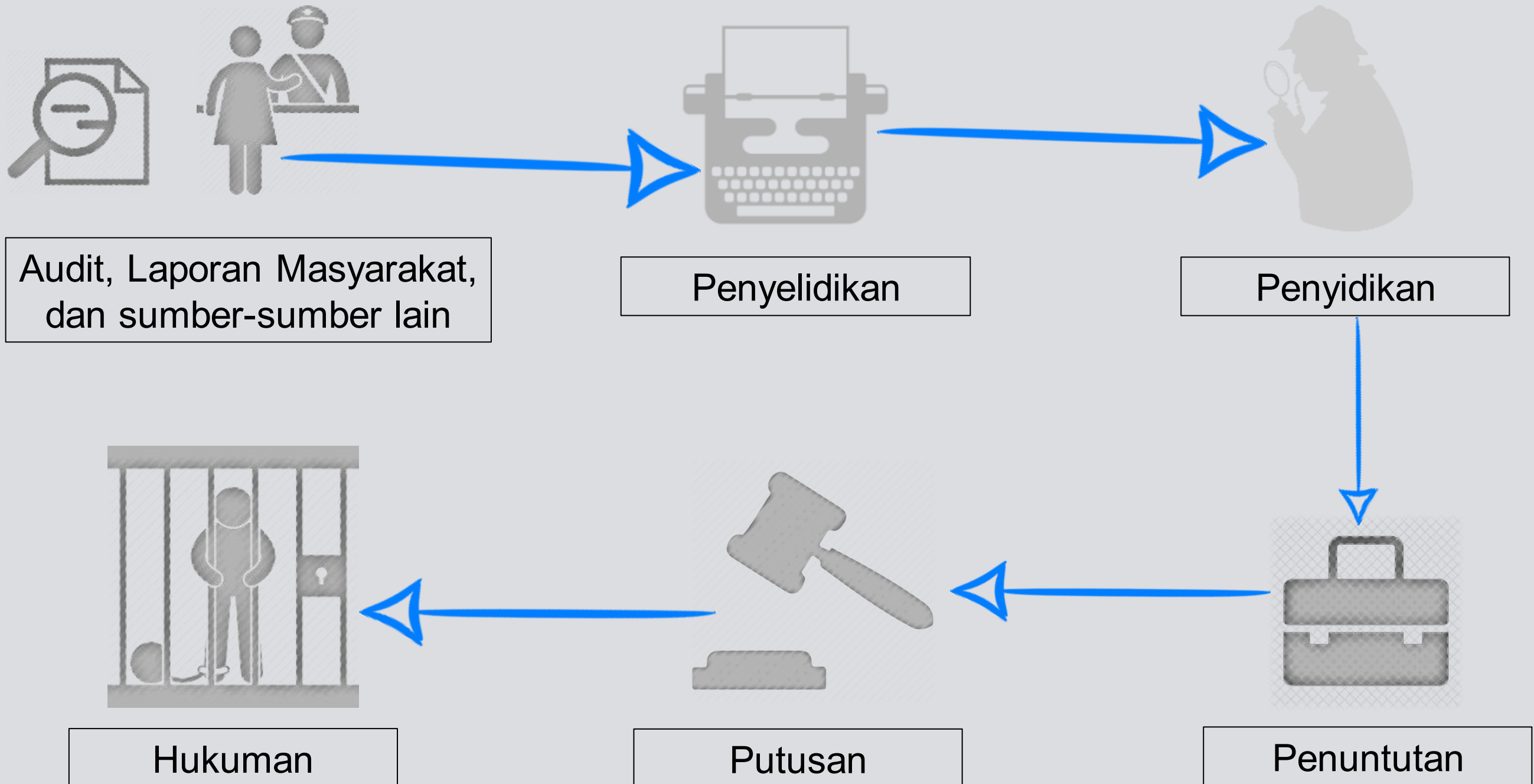
mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau



menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1M.



# Penindakan











## Fungsi Pencegahan KPK



**Pendidikan  
&  
Pelayanan  
Masyarakat**



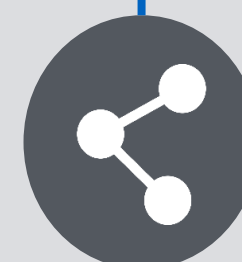
**Penelitian &  
Pengembangan**



**Pendaftaran  
&  
Pemeriksaan  
LHKPN**



**Pelaporan  
Gratifikasi**

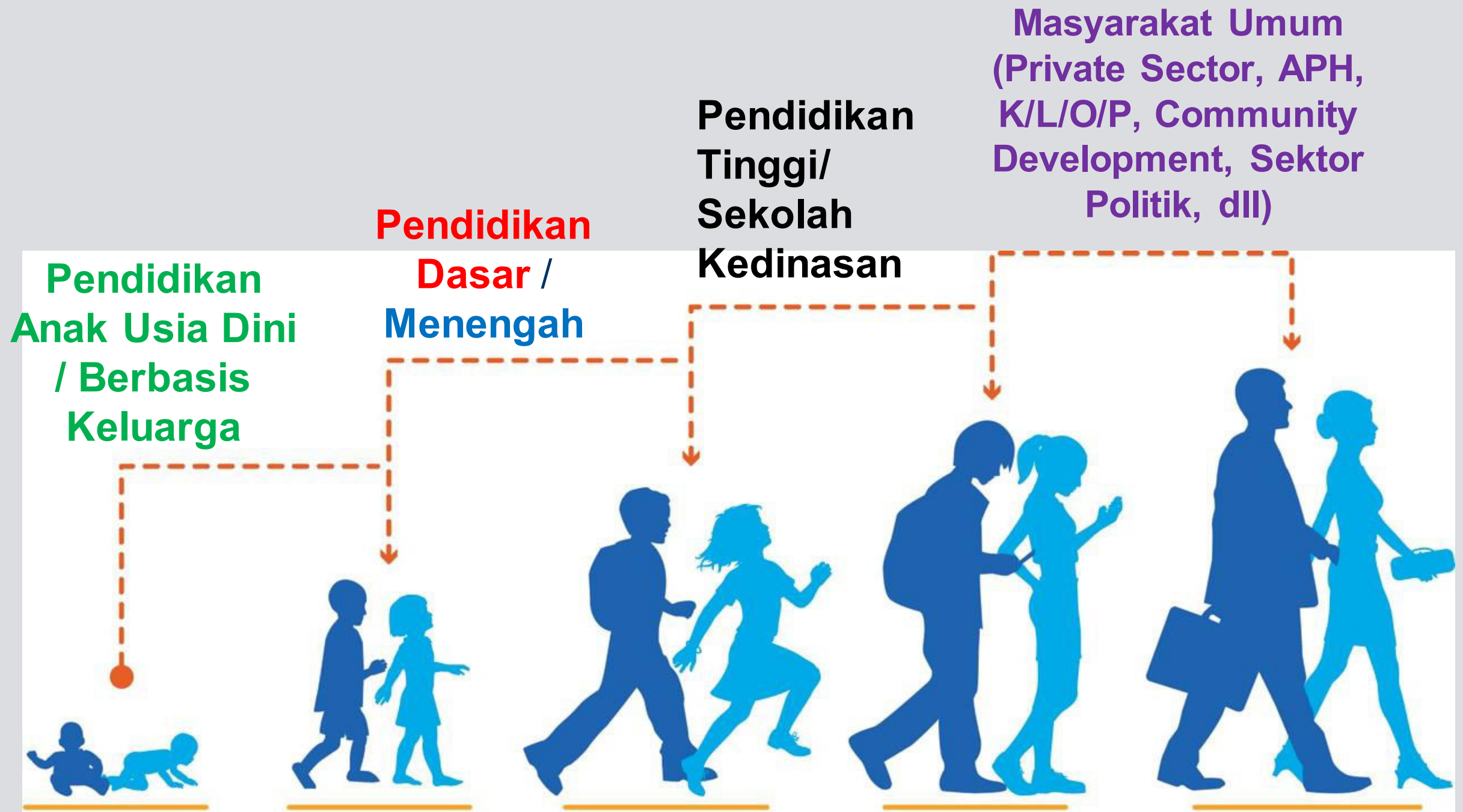


**Koordinasi &  
Supervisi  
Bidang  
Pencegahan**



# Pendidikan Antikorupsi oleh KPK

Pasal 13 huruf C UU KPK



# Penelitian dan Pengembangan

## Kajian Perizinan *Political Risk and Economic Survey*

**2017**

Menjalin kemitraan  
dengan :

**23** Provinsi

**380** Pemerintah  
Daerah

untuk menerapkan  
Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (PTSP)

**60%** **Tingkat  
Pencapaian**

**2018**

mendorong  
Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (PTSP) di  
seluruh Pemerintah  
Daerah



### **Kajian Sistem Administrasi Pemerintah:**

Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka perbaikan sistem tata kelola pemerintahan (PBJ, Tata Kelola, Sistem Politik, alih fungsi hutan, migas, pendidikan, dll).

# LHKPN Sebagai Perangkat Pencegahan

2017



2018  
85%

Target  
Kepatuhan  
Nasional

245,815  
Laporan

78%  
Kepatuhan  
Nasional

28%  
Kepatuhan  
Terendah  
(DPRD)



Wajib lapor diundang untuk  
keterangan tambahan dan  
klarifikasi harta.



# Pelaporan Gratifikasi

**17%** 130 dari 760 instansi

**1600**  
Laporan  
di 2017



**25%** Peningkatan  
laporan pada 2018



Terbitnya  
Peraturan Menteri  
Kesehatan tentang  
*sponsorship*



**450**

Unit Pelayanan  
Gratifikasi di  
Kementerian/ Lembaga/  
Pemerintah Daerah

# 9 PROGRAM KORSUPGAH



# Fokus Koordinasi & Supervisi Pencegahan

**TITIK  
RAWAN**

- Alokasi tidak fokus pada kepentingan publik
- Hibah dan Bansos yang tidak tepat
- Intervensi pihak luar

- Penyuaipan/ Pemerasan/ Gratifikasi
- Pelayanan yang kurang
- Perizinan tidak transparan
- Lemahnya pengendalian

- Proses yang tidak transparan
- Mark up harga
- Pemecahan proyek
- Pelaksana tidak independen
- Spesifikasi yang berbeda

- Kurangnya jumlah dan kualitas APIP
- APIP yang tidak independen
- Anggaran pengawasan belum memadai

- Lemahnya manajemen SDM
- Penghasilan PNS belum memadai

**Perencanaan dan Penganggaran**

**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Pengadaan Barang dan Jasa**

**Kapabilitas APIP**

**Manajemen SDM**

- *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi
- Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD
- Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB)

- Pelimpahan 100% kewenangan
- Informasi perizinan (*online & offline*)
- Aplikasi perizinan
- Ketersediaan aturan
- Rekomendasi Teknis

- Organisasi ULP yang mandiri
  - Pokja Permanen
  - 100% Pengadaan Belanja Modal via ULP
  - E-Katalog

- Kecukupan jumlah & kualitas APIP
- Kelembagaan APIP
- Kecukupan anggaran pengawasan
- Melaksanakan workshop APIP

- Perbaiki Manajemen APIP
- ANJAB, ABK, EVAJAB
- Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai

**ACTION  
PLAN**



# Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Denpasar Jadi Percontohan KPK



TERIMA KPK - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra (hiri) saat menerima rombongan KPK RI yang dipimpin Kabag Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha (hiri nomor 2). Kamis (3/8) kemarin di ruang Damamaya Denpasar Cyber Monitor, Sewaka Dharma, Lumintang.

PELAYANAN Terpadu Satu Pintu Pemkot Denpasar yang diwujudkan dalam satu kawasan gedung pelayanan Graha Sewaka Dharma, Lumintang mendapat apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tahun sebelumnya pelaksanaan proses pelayanan ditinjau langsung KPK RI serta direkam khusus lewat *screening video* dan disebar ke seluruh Indonesia. Peninjauan tahun ini dilanjutkan melihat inovasi Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota I GN Jaya Negara yang didukung penuh DPRD Denpasar dalam satu sistem Teknologi Informasi di Damamaya Denpasar Cyber Monitor.

"Data yang ditampilkan sangat lengkap dengan reaksi cukup cepat dan kami ingin memotret kondisi dan layanan yang terbaru di Denpasar, sehingga nantinya bisa diterapkan di daerah-daerah lain," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK RI Priharsa Nugraha di sela-sela kunjungannya ke ruang Damamaya Denpasar Cyber Monitor yang diterima langsung Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Kamis (3/8) kemarin di Sewaka Dharma Lumintang.

Menurut Priharsa Nugraha, lewat sistem ini juga bisa menurunkan tingkat korupsi. Di mana hal ini dikarenakan adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan pemangku

kepentingan yakni Pemerintah Kota Denpasar melalui laporan pengaduan yang mampu mengontrol jalannya pemerintahan. "Sejauh ini kami ingin mendalami sistem ini seperti apa dan melihat pelaksanaan program dari sistem ini secara detail di lapangan," kata Priharsa Nugraha.

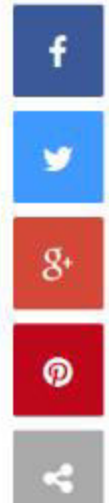
Tujuan kedatangannya ke Denpasar melakukan *screening video* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkot Denpasar serta melakukan diskusi tentang kampanye antikorupsi. Dalam kunjungan ini juga, Denpasar dijadikan percontohan pelayanan publik bagi daerah-daerah di Indonesia. Di samping itu pada tanggal 9 Desember mendatang Denpasar diadukan KPK RI menjadi tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Nasional.

Dipilihnya Denpasar tak terlepas dari inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan serta diharapkan event ini mampu lebih menginternasional. "Kami ingin menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini serius dalam hal pemberantasan korupsi. Tidak sebatas seremonial saja. Dan kebetulan hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar yakni upaya-upaya perbaikan dalam layanan yang lebih baik lewat Damamaya Denpasar Cyber Monitor," pungkasnya.

Hal. 19  
Tuan Rumah

# KPK Supervisi Korupsi Seluruh Daerah di Riau, Begini Hasilnya

Selasa, 13 Maret 2018 11:53



Senin 20 Februari 2017, 19:48 WIB

# 6 Kesepakatan KPK dan Pemprov Banten untuk Cegah Korupsi

Bahtiar Rifa'i - detikNews



Kamis 24 Juli 2014, 12:16 WIB

# Memetik Hikmah dari Ahok dan KPK di Balai Uji KIR, Sampai Kapan Pungli Bertahan?

- detikNews



Rabu, 1 Agustus 2018

# KPK dan PPATK Kerja Sama Awasi Aliran Dana di Pilkada 2018

Reporter: Alfan Hilmi  
Editor: Rina Widiastuti

Selasa, 6 Maret 2018 18:58 WIB





## KPK Siapkan Pendidikan Politik Bagi Politikus Muda

TERPOPULER

1 Alasan Prabowo Bertemu PKS dan PAN di Rumah Maher Algadrie

Browser address bar: https://www.liputan6.com/news/read/2822275/kurangi-praktik-suap-d... Search



berita apa yang ingin anda baca hari ini?

CARI

MASUK

Home > News > Peristiwa

## Kurangi Praktik Suap di Swasta, KPK Buat Gerakan PROFIT

Fachrur Rozie  
09 Jan 2017, 20:51 WIB

Share 15 (Facebook, Twitter, Google+, Email, WhatsApp)

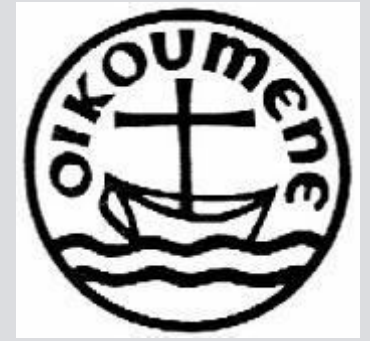


ARTIKEL TERKAIT Lihat Semua >

VIDEO: Jembatan Ampera Palembang Jadi Daya Tarik Asian Games 2018

Asian Games 2018: KONI





ANGKATAN  
PERUBAHAN



**KPK**

**Komisi Pemberantasan Korupsi**



**SEKNAS  
FITRA**



**KETJILBERGERAK**



**Gabungan Industri  
Kendaraan Bermotor Indonesia**  
The Association of Indonesia Automotive Industries



Seni  
Indonesia  
Berkabung  
2015





# Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi: Riau, 2017







# SEKOLAH DESA #1 DANA DESA



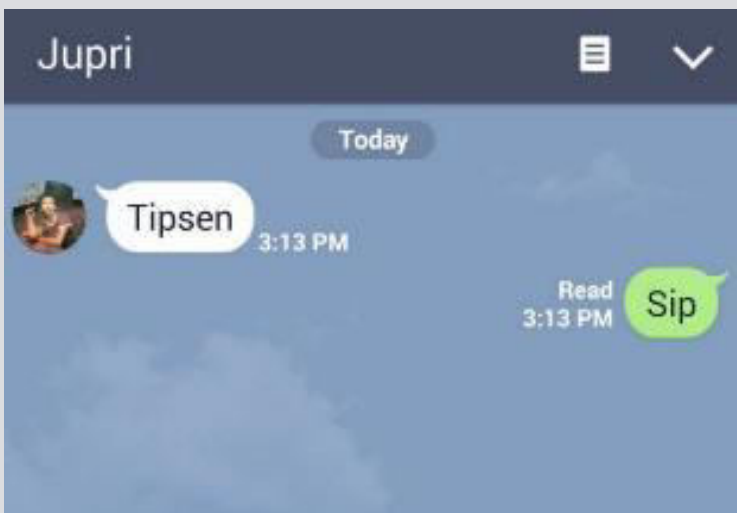
***Kita?***







# Perilaku koruptif: Lahirnya koruptor di masa depan



# Kontak Layanan Pengaduan Masyarakat

KPK menyediakan berbagai saluran dalam menampung pengaduan tindak pidana korupsi



<http://kws.kpk.go.id>  
KPK Whistle-blower's System

(021) 2557 8389

(021) 5289 2454

0855 8 575 575  
0811 959 575

[pengaduan@kpk.go.id](mailto:pengaduan@kpk.go.id)

Yang perlu diperhatikan:

- Persyaratan pelaporan
- Kelengkapan pelaporan
- Bukti permulaan pendukung pelaporan
- Perlindungan bagi pelapor





**JANGAN DIAM !!**  
LAWAN KORUPSI BERSAMA-SAMA

**Thank you**

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jalan Kuningan Persada Kav.4,  
Guntur, Setiabudi,  
Jakarta Selatan  
Telp: (021) 2557 8300  
kpk.go.id  
acch.kpk.go.id

**integrito**

**Kanal RADIO**  
**KPK TV**  
kanal.kpk.go.id

**INTEGRITAS**  
JURNAL ANTIKORUPSI

**e|hkpn**  
Transparan itu Mudah!

**PROFIT**  
profesional berintegritas

**KPK Whistleblower's System**  
Pengaduan Masyarakat

**POLITIK** CERDAS  
BERINTEGRITAS

**Pusat Edukasi Antikorupsi**  
Cipta • Karya • Berdaya

